

SKRIPSI

**PELAKSANAAN KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG PARIAMAN TERHADAP
PENCATATAN KEMATIAN**

*Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

NOVI SUNARTI

1510111109

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

(PK VII)



Pembimbing :

Syofiatri, S.H., M.Hum

Hendria Fithrina, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

PELAKSANAAN KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG PARIAMAN TERHADAP PENCATATAN KEMATIAN

(Novi Sunarti, 1510111109, Fakultas Hukum 2019, 76 Halaman)

ABSTRAK

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) merupakan Instansi Pelaksana yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelayanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diatur dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Salah satu bentuk pelayanan disdukcapil terkait dengan pencatatan peristiwa penting yaitu pencatatan kematian. Pelayanan pencatatan kematian di Kabupaten Padang Pariaman masih dalam kategori rendah, dibuktikan dengan jumlah penerbitan akta kematian setiap tahunnya hingga tahun 2017. Akta Kematian sebagai akta autentik berguna bagi penduduk dan/atau warga sipil dan pemerintah, baik untuk kepastian hukum dan aspek pembangunan lainnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Padang Pariaman adalah kewenangan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman. Rendahnya pencatatan kematian di Kabupaten Padang Pariaman, penulis menghubungkan dengan bagaimana pelaksanaan kewenangan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman terhadap pencatatan kematian dan kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Adapun tujuan dari penulisan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan kewenangan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman terhadap pencatatan kematian.

Metode penulisan yaitu yuridis empiris (*social legal research*), dengan melihat keadaan dilapangan lalu membandingkan dengan pengaturan yang ada. Jenis data, addata primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara serta teknik analisa data secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya sesuai data yang ditemukan. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan kewenangan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman terhadap pencatatan kematian belum terlaksana secara optimal, dan dalam menjalankan kewenangan terdapat hambatan atau kendala yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan pencatatan kematian. Kendala atau hambatan diantaranya rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pencatatan kematian, sumber daya manusia Disdukcapil Kab. Padang Pariaman yang terbatas dan kecilnya anggaran terkait dengan pencatatan kematian.

Kata Kunci : Pelaksanaan Kewenangan, Pencatatan Kematian.